

BAB V

KESIMPULAN

Uni Eropa sebagai organisasi regional mempunyai kebijakan dalam mengatur negara-negara anggotanya. Salah satu mimpi besar *Eurozone* dalam hal intergrasi regional adalah mencapai bentuk *Economic and Monetary Union* (EMU). Negara-negara anggota *Eurozone* harus menyesuaikan sistem perekonomian yang telah ditetapkan oleh EMU. Bukan hal yang mudah menjadi anggota *Eurozone* karena setiap negara anggota dituntut untuk mampu menjaga perekonomiannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh EMU. Sedangkan di dalam *Eurozone* tidak hanya negara besar namun juga terdapat negara-negara kecil seperti Yunani.

Yunani saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan karena anggaran defisit Yunani yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh EMU. Anggaran Yunani yang besar dan tidak diimbangi dengan kemampuan perekonomian negaranya menyebabkan akumulasi hutang yang membengkak. Sebelum bergabung dengan *Eurozone* pemerintah Yunani sudah boros dalam hal anggaran, setelah masuk menjadi anggota *Eurozone* dan mengadopsi mata uang *Euro* pengeluaran public Yunani justru semakin meningkat. Yunani lebih banyak melakukan impor daripada ekspor. Sedangkan pengeluaran Yunani merupakan salah satu pengeluaran terbesar jika dibanding dengan negara anggota *Eurozone* yang lain. Hal ini yang menyebabkan anggaran Yunani selalu mengalami ketidakseimbangan.

Krisis Yunani yang tidak kunjung membaik berdampak besar bagi perekonomian negara-negara anggota *Eurozone* lain. Efek domino yang ditimbulkan dari krisis Yunani menyebar ke negara anggota *Eurozone* lain seperti Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol. Kompleksitas krisis yang terjadi di Yunani akhirnya mendorong terjadinya interaksi-interaksi antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa untuk segera menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi.

Berbagai upaya telah Uni Eropa lakukan untuk menyelesaikan krisis Yunani seperti memberikan pinjaman yang dimonitori oleh Uni Eropa, *European Central Bank*, dan IMF. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah defisit anggaran Yunani agar berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh *Stability and Growth Pact* (SGP) yaitu sebesar 3%. Namun, bantuan yang diberikan kepada Yunani tidak hanya begitu saja diberikan, Yunani harus menyetujui EAP yang ditetapkan Uni Eropa, dengan kata lain Uni Eropa berhak memberikan rekomendasi reformasi struktural kepada pemerintah Yunani. Selain itu, Yunani harus rela anggaran nasionalnya diawasi oleh Uni Eropa beserta implementasi kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam memorandum. Dengan adanya EAP sebagai kebijakan Uni Eropa diharapkan perekonomian Yunani akan lebih baik dibandingkan sebelumnya, khususnya dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi.